

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara

The Effect of the Application of Public Sector Accounting On the Accountability of Government Agency Performance at The Regional Revenue Agency North Toraja Regency

Irpan Tandibua^{*1}, Muhammad Idris², Farida¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: irpantandibua12@gmail.com

Diterima: 02 Mei 2024 / Disetujui: 30 Agustus 2024

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis linier sederhana. Data diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan kuesioner yang disebar kepada 24 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan penerapan akuntansi sektor publik berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, yang terlihat dari pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi sektor publik yang baik menjadi alat penting dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan transparansi, sehingga mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya penguatan penerapan akuntansi sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait tata kelola keuangan publik yang baik.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah

Abstract. This study aims to analyze the influence of public sector accounting implementation on the accountability of government agency performance in North Toraja Regency. The research employs a quantitative approach using a simple linear analysis method. Data were obtained through observation, literature review, and questionnaires distributed to 24 respondents from Regional Government Organizations (OPD). The results indicate that the implementation of public sector accounting positively impacts the accountability of government agency performance. Clear implementation of public sector accounting contributes to improved accountability, as evidenced by more transparent and accountable management of financial resources. Proper public sector accounting serves as an essential tool in supporting efficiency, effectiveness, and transparency, thereby optimizing the execution of governmental functions. Hence, the findings highlight the importance of strengthening public sector accounting implementation to enhance the accountability of local government agency performance, particularly in North Toraja Regency. This research is expected to serve as a reference for further studies on good public financial Public sector accounting, Performance Accountability, Government Agencies l governance.

Keywords: Sales



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu akuntansi sektor publik di Indonesia semakin kesini semakin berkembang, terutama digunakan sebagai suatu alat pengawasan dan pelaporan dalam akuntabilitas, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan juga pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan Lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Pemerintah sangat berperan penting bagi akuntansi sektor publik karena termasuk entitas yang sangat besar. Seperti yang kita tahu, bahwa negara kita adalah negara hukum yang tentunya memberi tuntutan terhadap Lembaga publik masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan juga dapa dipertanggungjawabkan, untuk

memberikan informasi keuangan lagi yang membutuhkan dan juga dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang sudah dilakukan. Akuntabilitas biasanya terkait dengan akuntansi dan manajemen dalam perusahaan. Akuntabilitas memiliki prinsip utama yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Apabila memenuhi suatu prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka akuntabilitas kinerja dapat tercapai. Dilihat dari fenomena saat ini, bahwasanya akuntansi sektor publik masih jarang dilakukan, begitupun dengan tingkat akuntabilitas yang masih rendah, karena tujuan yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan, ukuran keberhasilan yang tak layak untuk di ukur. Program kegiatan ini ditetapkan tidak sesuai dengan sasaran. Hal ini menunjukkan fenomena yang menyebabkan adanya tuntutan suatu pertanggungjawaban baik secara individu ataupun penguasa, karena pada dasarnya akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari sebuah kegagalan atau keberhasilan suatu misa. maka dipandang perlu adanya penerapan akuntansi sector publik serta dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (LAN,2023). Menurut Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan sebuah pedoman atau kerangka yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban publik. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan – urusan pemerintah dapat optimal. Pentingnya akuntabilitas semakin diperlukan seiring dengan proses globalisasi yang menuntut pemerintah untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government) dalam peningkatan kinerja sektor pelayanan publik. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap sektor pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah kepada masyarakat harus semakin memuaskan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Toraja Utara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiono, 2018). Adapun tujuan dari analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic data dalam bentuk angka yang digunakan yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016), penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode kausal komparatif

(causal-comparative research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dan pengaruh antara dua variable atau lebih.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Toraja Utara awalnya pada tahun 2008 bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang DPPKAD lebur atau dibagi menjadi dua bagian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a) Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modal terhadap pendapatan. *Statistical Package for Social Science* (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear sederhana.

Tabel 1. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.807	9.576		2.904	.008
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.658	.316	.406	2.081	.049

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data Primer Diolah 2023

Dari Tabel 1. diatas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 27.807, sedangkan nilai penerapan akuntansi sektor publik (b/kofisien regresi) sebesar 0,658 dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 27.807 + 0,658X$$

Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan konstanta sebesar 27.807 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 27.807 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai akuntansi sektor publik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan bertambah sebesar 0,658. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh akuntansi sektor publik (variabel X) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (variabel Y) adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas sebesar $0,049 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

b) Hasil Uji F

Pada penelitian hasil uji F dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari hasil uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Dengan kriteria pengujian tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau nilai signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikasinya $> 0,05$ H_0 ditolak dan jika nilai nya $< 0,05$ maka H_a diterima. Untuk lebih jelasnya, hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	28.783	1	28.783	4.332	.049b
Residual	146.175	22	6.644		
Total	174.958	23			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Sumber: Data Primer Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 2 diatas, hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $4,332 > F_{tabel}$ sebesar 3,44 dan nilai P value sebesar 0,049^b lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan

akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis H1 diterima.

c) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406a	.165	.127	2.57766

a. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntansi Sektor Publik

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Dari hasil Tabel 3 menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,406. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,165 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Akuntansi Sektor Publik) terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebesar 16,5%.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji F yang diperoleh, nilai Fhitung sebesar 4,332 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan penerapan akuntansi sektor publik memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai P value sebesar 0,049 lebih kecil dari nilai alpha (0,05), memperkuat hasil tersebut bahwa pengaruh ini signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja diterima. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,406 menunjukkan hubungan positif antara variabel bebas (penerapan akuntansi sektor publik) dan variabel terikat (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,165 memberikan interpretasi bahwa penerapan akuntansi sektor publik menjelaskan 16,5% dari variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruhnya signifikan, penerapan akuntansi sektor publik bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja.

Sebanyak 24 pegawai dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang terdiri atas 24 OPD menjadi responden penelitian ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang tidak dilakukan dengan baik akan berdampak negatif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, penerapan yang baik dan benar akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Hawalya (2023), yang juga menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan akuntansi sektor publik yang baik memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut teori dari Anthony dan Govindarajan (2017), akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan informasi ini, instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja tidak selalu mutlak. Studi oleh Sukoco dan Pramuka (2018) menemukan bahwa meskipun akuntansi sektor publik diterapkan dengan baik, kurangnya pemahaman dari pegawai mengenai pentingnya akuntansi tersebut dapat mengurangi efektivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan teori good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut BPKP (2020), salah satu pilar good governance adalah akuntansi sektor publik yang transparan. Akuntansi yang transparan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja. Kendati demikian, terdapat beberapa penelitian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil ini. Misalnya, penelitian oleh Nasution (2019) menyebutkan bahwa

meskipun penerapan akuntansi sektor publik telah dilakukan, tingkat akuntabilitas kinerja tetap rendah jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti pengawasan dan kepemimpinan turut berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari perspektif implementasi, penerapan akuntansi sektor publik sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan bagi pegawai dan keterbatasan teknologi informasi. Menurut penelitian oleh Rahmat dan Lestari (2021), penerapan teknologi yang memadai dalam akuntansi sektor publik dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam sistem akuntansi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.

Selain itu, budaya organisasi juga memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik. Studi oleh Sari dan Prabowo (2020) menyebutkan bahwa budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi hambatan dalam implementasi akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi yang mendukung good governance perlu menjadi prioritas. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dilakukan secara konsisten dan didukung oleh pelatihan yang memadai bagi pegawai. Selain itu, pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi juga menjadi langkah strategis untuk mendukung penerapan akuntansi sektor publik. Dukungan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik. Peraturan yang jelas dan tegas mengenai standar akuntansi sektor publik dapat memberikan pedoman yang lebih baik bagi instansi pemerintah. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD, penerapan standar akuntansi berbasis akrual adalah salah satu langkah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan keuangan tetapi juga pada aspek non-teknis seperti peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori kepercayaan publik oleh Fukuyama (2018). Sebagai penutup, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ada banyak faktor lain yang juga perlu diperhatikan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan pendekatan yang komprehensif, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terus ditingkatkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana dibuktikan oleh nilai *F*hitung sebesar 4,332 yang lebih besar dari *F*tabel sebesar 3,44, serta nilai *P* value sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan koefisien korelasi (*R*) sebesar 0,406 dan koefisien determinasi (*R* Square) sebesar 0,165, penerapan akuntansi sektor publik menjelaskan 16,5% dari variasi akuntabilitas kinerja, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dukungan pelatihan, teknologi informasi, budaya organisasi, serta kebijakan yang jelas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah, K. (2017, Januari). Pengaruh Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. *Economis Bosowa Journal*, 3, 117-126.
- Apriliani, Triana Sukma (2022) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Undergraduate Thesis, Politeknik Negeri Jember.
- Cantika, Yulia. (2018). "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar". Skripsi. Universitas Islam Negeri

- Alauddin Makassar.
- Deni Harianto, K. A. (2021, Agustus 22). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6, 122-139.
- Evada Dewata, Y. S. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 541-550.
- Hawalya, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Skripsi Universitas Bosowa.
- Hafzhan, Muhammad (2021) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasanah, Atikah. 2021. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Vi Medan)". Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Helin Gustri Mulya, E. F. (2022, Februari). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4, 192-212.
- Rio Pratama, H. A. (2019, Februari). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 429-444.
- Santoso, U. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Center for Business Studies FISIP UNPAR*, 14-33.
- Sadeli, Y. A. (2018, Desember). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Permerintah Kota Makassar. *Jurnal Tangible*, 3(2), 169-183.